



PEMBANGUNAN Lewat Danais, Bangun 25 Rumah Berarsitektur Khas Yogyakarta

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) terus memperluas cakupan penataan hunian masyarakat. Selain mempercepat rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), inovasi baru digulirkan dengan membangun 25 unit rumah layak huni yang mengusung arsitektur khas Yogyakarta.

Proyek estetis ini sepenuhnya didanai melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan (Danais) DIY.

■ Baca **LEWAT...** Hal II

Lewat Danais, Bangun 25 Rumah Berarsitektur Khas Yogyakarta

sambungan dari hal Jogja Jogja

Analisis Kebijakan Ahli Muda DPUPKP Kota Yogyakarta, Yunita Rahmi Hapsari, menjelaskan proyek hunian khas Yogyakarta ini berjalan beriringan dengan program penataan kawasan lainnya.

"Di antaranya adalah rehabilitasi rumah terdampak penataan kawasan Mundur, Mungguh, Madep Kali (M3K) serta program pembangunan rumah baru berbasis konsolidasi lahan. Program perumahan ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah sehingga seluruh anggarannya dipastikan aman dan tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi maupun pemangkasan anggaran," katanya, kemarin (24/6).

Di sisi lain, Pemkot Yogyakarta juga tengah memacu penyelesaian program peningkatan kualitas RTLH reguler tahun anggaran 2026. Hingga pertengahan tahun ini, progres fisik di

lapangan baru menyentuh angka 30 persen. "Kami tetap optimistis seluruh paket pekerjaan yang bersumber dari APBD maupun APBN dapat rampung tepat waktu, dengan target penyelesaian paling lambat pada November mendatang," jelasnya.

Secara kumulatif, sasaran perbaikan RTLH yang dibiayai dana pemerintah tahun ini menasar 173 unit rumah. Anggaran penataan tersebut disokong oleh APBD Kota Yogyakarta sebesar Rp595 juta untuk 63 unit rumah, APBD DIY senilai Rp40 juta untuk dua unit rumah, serta kucuran dana pusat melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp2,16 miliar untuk mengintervensi 108 unit rumah.

Mayoritas hunian yang disasar masuk dalam kategori rusak berat yang berisiko mengancam keselamatan penghuninya, di samping

kategori rusak sedang yang membutuhkan perbaikan elemen struktural seperti fondasi dan rangka atap.

Komitmen pengentasan kawasan kumuh ini kian solid berkat sinergi dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Tercatat, sudah ada 49 unit rumah yang berhasil direhabilitasi lewat skema nongovernmental tersebut.

Rata-rata korporasi mengucurkan stimulan sebesar Rp20 juta per rumah, di mana nilai tersebut kerap berkembang di lapangan berkat tingginya semangat gotong royong dan partisipasi swadaya dari warga sekitar. Seluruh lokasi penerima manfaat ini tersebar merata di berbagai wilayah Kota Yogyakarta berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan laporan yang masuk dari masyarakat. (eri/bid/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005